



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Unfolding Australia's Securitization on Refugees during COVID-19: An Act of Security Threat or Political Bias?
PUTRI BUDIATY, Dr. Dafri Agussalim, M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNFOLDING AUSTRALIA'S SECURITIZATION ON REFUGEES DURING COVID-19: AN ACT OF SECURITY THREAT OR POLITICAL BIAS?

Putri Budiaty (17/415960/SP/28126)

Abstract: Australia has always been recognized and applauded for being a multicultural community, with more than half of its permanent residents born overseas. As a signatory to the 1951 Refugee Convention, Australia is accountable for accommodating and resettling people of concern; thus, its donations to the UNHCR have outstandingly been ranked among the top 10 donators. Consequently, advertising the country as a good international citizen in the eyes of the international community. Howbeit, its stringent refugee policies have left asylum seekers and refugees unattended in offshore detention centers waiting for the indefinite decision on their protection visa. Rooted from the fear and threat vulnerability of being harmed, asylum seekers and refugees are seen in a negative frame as they are titled with terms such as 'illegal boat people' or 'terrorists', resulting in the securitization of the issue. Hence, it raises questions on how the Australian Government can sustain the issue as a high political matter whilst framing asylum seekers and refugees as a threat to the nation.

This thesis then proposes two main bases: the use of Australian media narratives as a justification over its heinous implementation of the Refugee Program, consequently shaping the general public to oversee the notion of refugees and asylum seekers as a burden to the community. As a result, the conditioned public fear is then further utilized to close the doors to refugees and asylum seekers, particularly during the widespread of the COVID-19.

Keywords: Refugees, Asylum Seekers, Securitization, Newscorp, Boat People

Abstrak: Australia selalu diakui dan dipuji sebagai komunitas multikultural dengan lebih dari setengah penduduk tetapnya lahir di luar negeri. Sebagai penandatangan "1951 Refugee Convention", Australia bertanggung jawab untuk menampung dan memukimkan kembali "people of concern" yang membuat sumbangan besarnya kepada UNHCR masuk dalam peringkat 10 besar penyumbang. Hal tersebut meningkatkan citra negara mereka sebagai warga internasional yang baik di mata masyarakat internasional. Namun, kebijakan refugee yang ketat telah membuat asylum seeker dan refugee menunggu keputusan yang tidak kunjung datang mengenai visa perlindungan mereka di pusat penahanan. Berakar dari ketakutan dan potensi ancaman yang membahayakan, asylum seeker dan refugee dipandang negatif karena mereka diberi istilah seperti 'illegal boat people' atau 'teroris' yang mengakibatkan isu tersebut dibesar-besarkan. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Australia mampu mempertahankan isu tersebut sebagai masalah politik yang patut diprioritaskan sembari membingkai asylum seekers dan refugee sebagai ancaman bagi bangsa.

Tesis ini kemudian mengajukan dua dasar argumen: penggunaan narasi media Australia sebagai pemberian atas implementasi Program Pengungsi yang keji sehingga membentuk masyarakat umum untuk berpikir bahwa asylum seekers dan refugee sebagai beban bagi masyarakat. Akibatnya, ketakutan publik yang dibentuk itu kemudian dimanfaatkan lebih lanjut sebagai cara untuk menutup pintu bagi para asylum seekers dan refugee khususnya di masa merebaknya COVID-19.

Kata-kata kunci: Refugees, Asylum Seekers, Securitization, Newscorp, Boat People